

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Politik Identitas

Dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political indetity*) dengan politik identitas (*political of identity*) *political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Habodin, 2012).

Heller (Dalam abdillah, 2002) mengidentifikasikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*differnce*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Ide perbedaan ini menjanjikan bentuk-bentuk kebebasan (*Freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*Free play*), meskipun dibalik itu terdapat konsekuensinya adalah munculnya intoleransi dan kekerasan. Karena fokus perhatiannya dan adanya perbedaan-perbedaan sebagai entitas politik yang signifikan dan determinan, maka politik perbedaan merupakan sebutan lain untuk politik identitas.

Konsep perbedaan telah dipaparkan oleh Aristoteles secara umum, dengan konsepnya yang disebut sebagai “penghilang jalan tengah”, (dalam Abdillah, 2002) bahwa sesuatu adalah A atau bukan A. tidak mungkin sesuatu itu adalah A sekaligus

bukan A atau bukan A dalam waktu yang sama, atau antara keduanya. Pemikiran ini mengisyaratkan bahwa sesuatu berbeda dengan sesuatu yang lain.

2. Pengertian Politik Identitas

Pada penjelasan sebelumnya politik identitas telah diungkapkan oleh Heller. Kemudian, seorang ilmuwan lain yang mendefinisikan politik identitas adalah Morowitz. Ia (dalam Haboddin, 2012) mendefinisikan politik identitas sebagai berikut:

“Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen“.

Baik Heller maupun Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Sementara Chandrakirana (dalam Haboddin, 2012) menyebutkan bahwa:

“Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “Orang Asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “Orang Pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”.

Namun pada bagian yang lain, Kemala (dalam Haboddin, 2012) mengatakan bahwa:

“Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesuksesan mendapat peran penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik”. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. *Kedua*, demi menjaga dan

melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap entitas yang dimilikinya.

Beyme (dalam Abdillah, 2002) membuat suatu catatan analisis mengenai pada gerakan politik identitas, yakni gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya.

Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem *apartheid* terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu. Sebagai contoh, tidak seorangpun yang bisa menolak bahwa seorang hitam atau seorang sarjana wanita bisa jadi telah mempunyai pengalaman yang membuat mereka sensitif dalam kasus-kasus tertentu menyangkut hubungan dengan kelompok yang lain.

Dari tiga kriteria tersebut, selanjutnya Beyme (dalam Abdillah, 2002) membuat analisis lanjutan dengan melihat politik identitas melalui pola gerakan, motifasi dan tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari analisis Beyme digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1

Model Politik Identitas

Model Teori	Pola Keterangan	Pola Aksi	Tujuan Gerakan
Pra Modern	Perpecahan objek (dimana ada perpecahan fundamental pasti ada gerakan sosial yang menyeluruh)	Mobilisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin.	Perampasan kekuasaan.
Modern	Pendekatan kondisional (Keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk mobilisasi)	Keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah.	Pembagian kekuasaan
Postmodernisme	Gerakan tumbuh dari dinamikanya sendiri. Proses munculnya dari berbagai macam kesepakatan individual. Tidak terdapat satu	Kesadaran diri.	Otonomi.

	pecahan yang dominan.		
--	-----------------------	--	--

Sumber: Abdillah 2002

Pengorganisasian identitas menjadi penting untuk mempertahankan eksistensi individu atau kelompok. Pada dasarnya identitas dibentuk dalam rangka memperoleh persamaan identitas sosial (*sosial equality*) dan pengakuan (*recognition*) dari pihak lain (Kinasih, 2007). Identitas lah yang memberikan jaminan kesadaran diri. Identitas akan selalu dipertahankan secara reflektif dengan berdasarkan pada perubahan kebutuhan dan kepentingan. Identitas adalah sebuah proses yang tidak terberi (*given*). Dan tidak statis (Kinasih, 2007:5). Menurut Abdillah (2002:26) pencarian identitas merupakan sebuah “proses menjadi”, yang dimana setiap individu atau kelompok terus menerus mengidentifikasi diri, mencari diri dan membentuk identitasnya. Identitasnya merupakan suatu yang *hybird* yang mudah dimanipulasi. Ketika lingkungan sosial politik mengalami perubahan maka identitas akan ikut berubah sehingga sulit dibedakan identitas asli dan mana identitas yang telah dipolitisasi. Mobilisasi identitas digunakan untuk menekan kaum yang dianggap memiliki identitas yang berbeda.

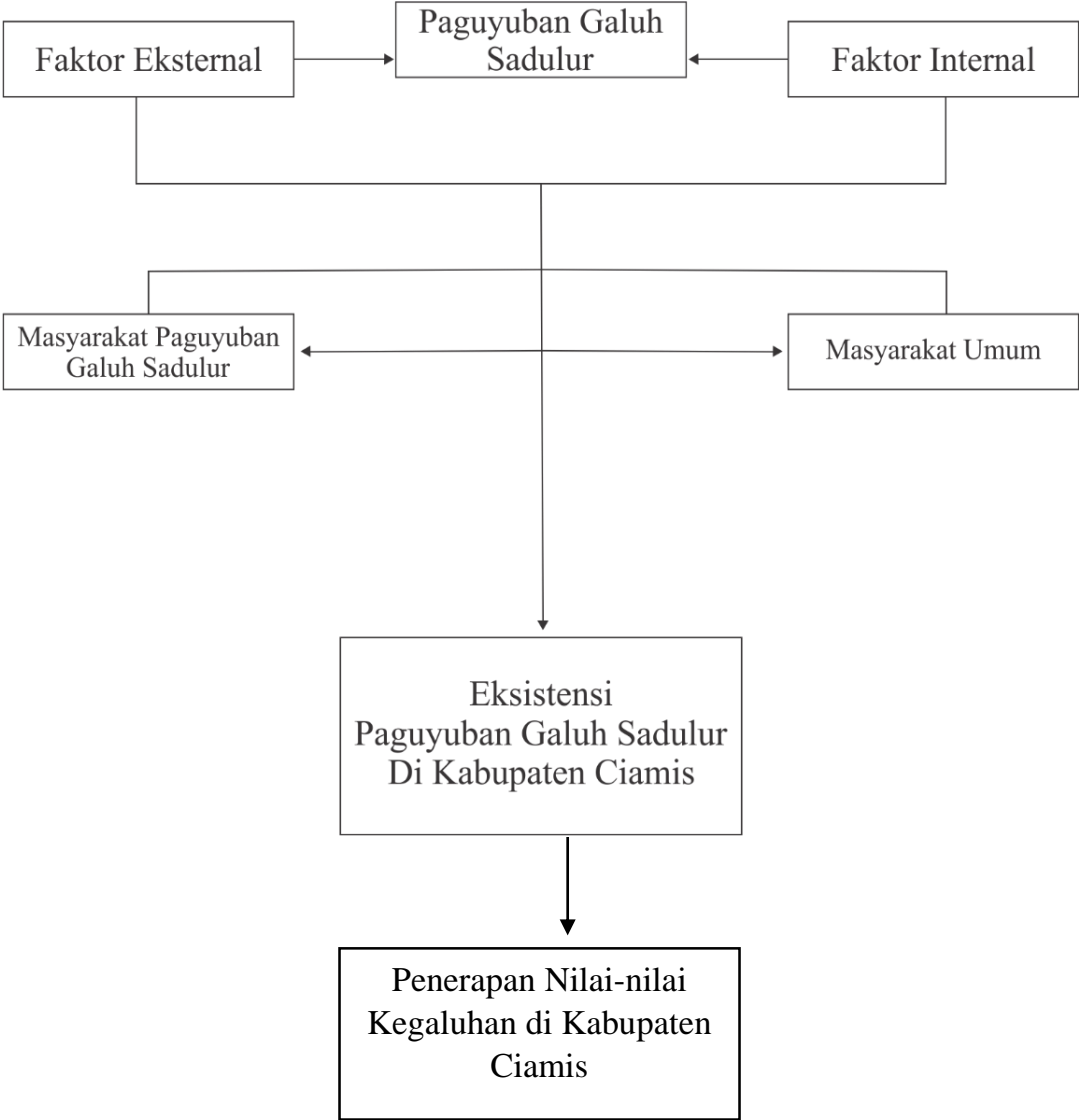
Konsep politik identitas yang telah dijelaskan diatas, akan dapat menganalisis dan menjelaskan bagaimana politik identitas dari “Paguyuban Galuh Sadulur” yang ada di Kabupaten Ciamis. Kemudian, dari pemahaman yang dapat dimengerti mengenai politik identitas yang ada pada Paguyuban Galuh Sadulur tersebut dapat diketahui dan dijelaskan mengenai nilai-nilai kegaluhan yang dipertahankan oleh paguyuban tersebut. Nilai-nilai itu diterapkan atau tidak, serta bermanfaat atau tidak dalam

masyarakat dapat diketahui sebagai hasil dari penelitian ini. Politik identitas paguyuban tersebut merupakan gambaran keterkaitan antara sebuah perkumpulan individu masyarakat dengan pemerintah. Hubungan tersebut dapat berdampak pada kinerja pemerintah untuk masyarakat pada sisi yang lain. Paguyuban pula berupaya untuk menjalin sebuah ikatan dengan pemerintah dalam tata pelaksanaan pengelolaan pemerintah. Sehingga, hubungan tersebut menjadi sebuah upaya timbal balik antara subjek dan objek kepada yang akan diberikan manfaat. Politik identitas juga mendorong upaya pemahaman tentang betapa pentingnya sebuah kebudayaan yang harus dipertahankan dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan-perubahan akibat dinamisnya zaman. Meskipun, zaman telah berbeda, namun nilai-nilai positif dari sebuah kebudayaan dapat dipertahankan sebagai ciri khas yang melekat pada suatu masyarakat yang membedakan masyarakat itu dengan masyarakat yang lain. Identitas itu penting dalam keberlangsungan kehidupan. Dengan menggunakan konsep identitas politik maka akan diketahui bagaimana sebenarnya pola gerakan politik identitas dari objek penelitian yang akan dilakukan.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Skema diatas menggambarkan alur yang ditempuh penulis dalam menjabarkan proses rencana penelitian yang diajukan. Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah paguyuban Galuh Sadulur yang terdapat di Lingkungan Rancapetir, Kelurahan Linggasari. Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis. Hal yang unik dari paguyuban Galuh Sadulur adalah paguyuban ini mempunyai Raja namun tak bermahkota dengan kekuasaan teritorial yang tak ada. Selain itu, paguyuban Galuh Sadulur juga masih melaksanakan tradisi-tradisi atau simbolisme Kegaluhan seperti misalnya *Mapaq Ramadhan*, *Kirab Pusaka dan Jamasan*, dan Upacara *Ngistrenan Wawakil Galuh*.

Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu, eksistensi paguyuban Galuh Sadulur kian hari kian diterima oleh khalayak umum. Meski demikian tidak mudah bagi paguyuban Galuh Sadulur untuk tetap mempertahankan keadaanya seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut berasal dari faktor eksternal maupun internal. Pertama, faktor internal yang mempengaruhi eksistensi keberadaan paguyuban Galuh Sadulur antara lain, usia *Jajadug* atau para pembesar kebanyakan tergolong usia tua, sedangkan usia remaja cenderung lebih sedikit daripadanya. Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi keberadaan paguyuban Galuh Sadulur salah satunya adalah teknologi. Dengan merambahnya teknologi, mengikis rasa keingintahuan pada sejarah leluhurnya dan masuknya ideologi, norma, dan kebiasaan, terutama anak-anak dan remaja yang sudah mempunyai alat-alat dengan teknologi canggih atau *gadget*. Teknologi memang tidak hanya memiliki dampak negatif saja, tetapi ada positifnya dari teknologi terhadap paguyuban Galuh Sadulur, seperti misalnya paguyuban ini

memanfaatkan penyebaran kegiatan-kegiatannya di media sosial demi menarik masyarakat luas untuk mengetahui dan mengenal paguyuban Galuh Sadulur. Walau begitu generasi muda yang termasuk dalam paguyuban Galuh Sadulur belum tentu dekat dan kental pada budaya leluhur mereka dan nilai-nilai kegaluhan karena adanya pengaruh dari luar.

Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin menggali lebih dalam bagaimana proses interaksi sosial antara paguyuban Galuh Sadulur dengan masyarakat pada umumnya. Dengan begitu maka akan diperoleh informasi terkait bagaimana eksistensi paguyuban Galuh Sadulur yang terdapat di Lingkungan Rancapetir, Kelurahan Lingasari. Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis. Dengan semakin diterimanya keberadaan paguyuban Galuh Sadulur maka akan lebih mudah bagi paguyuban Galuh Sadulur dalam menerapkan nilai-nilai kegaluhan di Kabupaten Ciamis.